

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Setiap lembaga atau instansi pemerintah dibentuk sebagai organisasi yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi menyediakan pelayanan sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat dan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Sebagian besar sumber dana yang diperoleh pemerintah berasal dari pajak, donasi atau sumbangan, utang, laba perusahaan negara atau daerah, sumber lainnya. Pemerintah sebagai manajemen yang mengelola keuangan negara memiliki tugas khusus dan dituntut untuk bertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber dana tersebut kepada masyarakat selaku pembayar pajak, donatur, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Rusmana, et al. (2017:20)

Dalam akuntansi berisi konseptual, standar, metode, prosedur dan teknik dalam melaporkan suatu keadaan keuangan yang biasa disebut sebagai laporan keuangan. Dalam definisi akuntansi laporan keuangan merupakan seni mencatat, menggolongkan, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan secara sistematis. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh setiap instansi pemerintah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta laporan keuangan yang baik dan memenuhi standar yang berlaku. Lembaga

atau instansi wajib menyusun laporan keuangan untuk mengungkapkan setiap kegiatan keuangan pemerintah yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai standar pedoman.

Laporan keuangan yang dilaporkan setiap lembaga atau instansi pemerintah akan memperlihatkan gambaran kondisi keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, dengan informasi laporan keuangan yang dilaporkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat merupakan sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang punya wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006, tugas Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang tersebut masuk ke dalam bagian ke Satu yaitu: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Lembaga negara lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Sesuai wewenangnya Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan tiga macam pemeriksaan pertama yakni pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kedua, pemeriksaan

kinerja yakni pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektifitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yakni pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigative dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pemerintah. Setiap hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya ditindak lanjuti, antara lain dengan membahasnya Bersama pihak terkait. Laporan hasil pemeriksaan selain disampaikan kepada lembaga perwakilan BPK juga menyampaikan ke lembaga pemerintah.

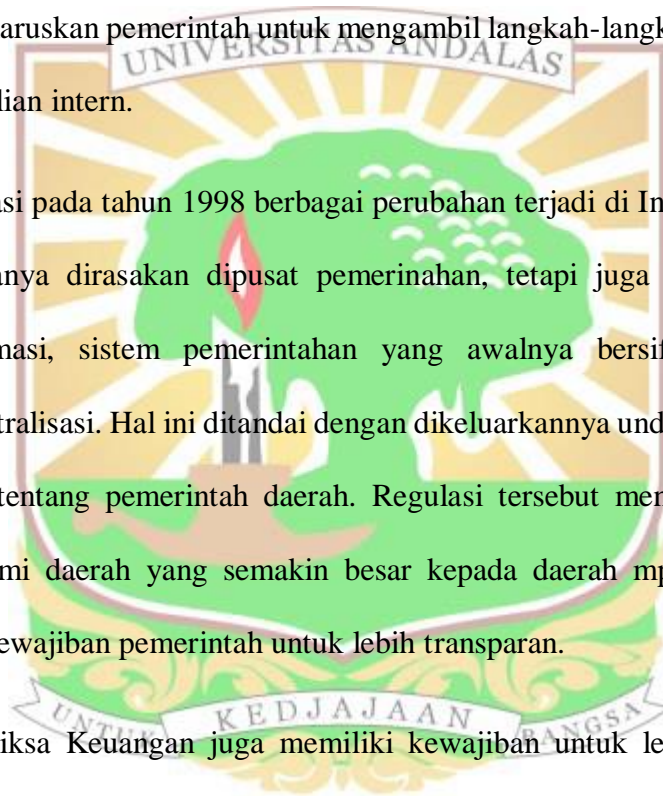
Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap aset dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan

yang adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab untuk mewujudkan *good governance*.

Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*), upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional, maupun internasional terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya pengendalian intern.

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan dipusat pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Implikasi dari adanya otonomi adalah kewajiban pemerintah untuk lebih transparan.

Badan Pemeriksa Keuangan juga memiliki kewajiban untuk lebih transparan dan akuntabilitas dan dapat mempertanggungjawabkan dana pemerintah yaitu dengan melaporkan kegiatan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Badan Pemeriksa Keuangan juga wajib menyusun dan melaporkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat



dipahami dan dipertanggungjawabkan untuk mengetahui bagaimana lembaga ini mengelola dana sehingga dapat memberikan gambaran kinerja.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas bagaimana mekanisme penyusunan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Barat dan mengangkat judul Tugas Akhir “Mekainisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sumatera Barat”

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka saya merumuskan masalah yaitu bagaimana mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Barat?

## **1.3. Waktu dan Tempat Magang**

Penulis berkesempatan magang di BPK Kantor Perwakilan Sumatera Barat yang beralamat di Jln. Khatib Sulaiman No. 54, Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 selama 40 hari kerja yaitu dari 04 Januari 2021 sampai 26 Februari 2021.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Magang**



### 1.4.1 Tujuan Magang

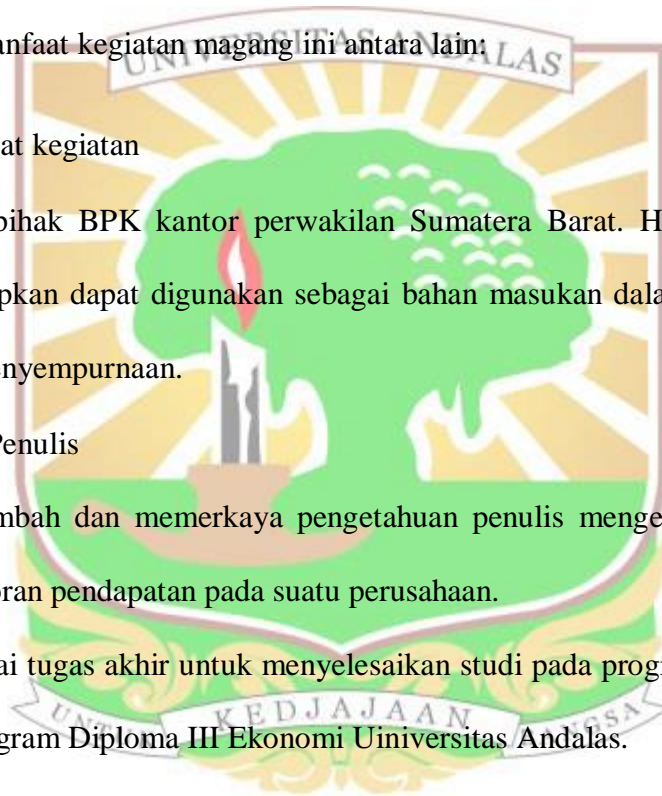
Adapun tujuan dari kegiatan magang ini yaitu:

Untuk mengetahui mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada BPK Kantor Perwakilan Sumatera Barat.

### 1.4.2 Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang ini antara lain:

1. Manfaat kegiatan
  - Bagi pihak BPK kantor perwakilan Sumatera Barat. Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan.
  - Bagi Penulis
    1. Menambah dan memerkaya pengetahuan penulis mengenai pencatatan dan pelaporan pendapatan pada suatu perusahaan.
    2. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi akuntansi di Program Diploma III Ekonomi Universitas Andalas.
    3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sumatera Barat.
    4. Kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan dengan praktik sesungguhnya.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Bab : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang yang mengungkapkan ulasan pemilihan topik rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. Tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, manfaat yang diterima oleh penulis maupun pihak lain, dan sistematika pelaporan berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir secara umum.

Bab I: Landasan Teori

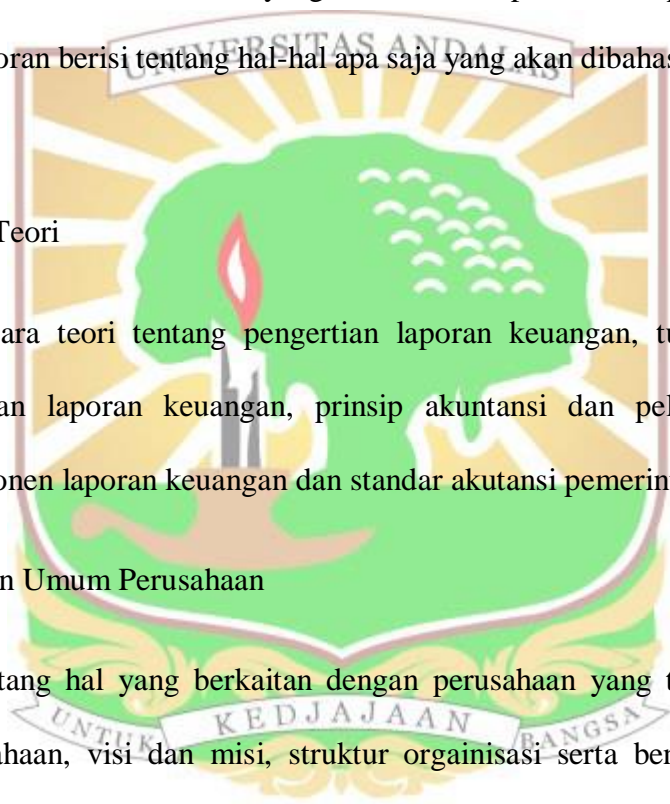
Menguraikan secara teori tentang pengertian laporan keuangan, tujuan dan laporan keuangan, peranan laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan.

Bab III: Gambaran Umum Perusahaan

Menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas usaha perusahaan.

Bab V: Pembahasan

Menguraikan tentang hasil kegiatan penelitian mengenai mekanisme Pencatatan dan Pelaporan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Barat.



## Bab V: Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pengamatan keseluruhan dari pelaksanaan yang telah dilakukan.

